

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait banjir yang telah menjadi masalah tahunan. Hal itu juga terjadi dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia, yang menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks urbanisasi yang pesat dan kondisi iklim yang ekstrem. Jakarta menghadapi masalah serius terkait banjir yang terjadi setiap tahun. Banjir yang melanda Jakarta tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Banjir di Jakarta tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan dampak lingkungan yang merugikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional serta secara langsung menghadapi tantangan yang ada pada kota bersangkutan tersebut.¹

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan. *Collaborative Governance* adalah pendekatan pengelolaan

¹ Detik. (2024, November 21). Apa itu Proyek Strategis Nasional (PSN)? Simak penjelasannya. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7261975/apa-itu-proyek-strategis-nasional-psn-simak-penjasannya>.

pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini berorientasi pada konsensus dan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama, yang dalam hal ini adalah penanganan banjir di Jakarta. Teori *Collaborative Governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks proyek-proyek berskala besar yang melibatkan banyak sektor. Dengan melibatkan semua pihak, program yang dijalankan dapat dikelola dengan lebih efektif, meminimalisir konflik kepentingan, dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam setiap tahap proyek.²

Dan dalam mengatasi perihal tersebut, inisiasi akan Proyek Sodetan Ciliwung akan didirikan, di Jakarta proyek ini tergolong PSN dan bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama ada di ibu kota. Proyek Sodetan Ciliwung menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak bencana ini. Proyek Sodetan Ciliwung adalah proyek lanjutan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, proyek ini dimulai pengerjaannya tanggal 23 Desember 2013 oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, sedangkan Jokowi saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek Sodetan Ciliwung adalah proyek lanjutan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, proyek ini dimulai pengerjaannya tanggal 23 Desember 2013 oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, sedangkan Jokowi saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2015, pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung

² Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press, 2020), hlm. [41].

tuntas sepanjang 550 meter, tetapi setelahnya mangkrak selama 6 tahun karena persoalan pembebasan lahan.³ Dan pada tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan Ciliwung 1,26 kilometer.⁴

Banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya curah hujan, buruknya sistem drainase, serta aliran air yang tidak tertampung dengan baik, khususnya di Sungai Ciliwung. Sungai ini sering meluap karena tidak mampu menampung debit air yang meningkat drastis saat musim hujan. Salah satu solusi yang diajukan pemerintah adalah pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT) dan Sungai Cipinang, yang diharapkan dapat mengurangi debit air yang mengalir ke wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Meski solusi ini terdengar menjanjikan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, terutama terkait kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek ini menjadi krusial karena melibatkan beberapa aspek penting seperti koordinasi lintas sektor, pembebasan lahan, hingga dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan sebagai

³ "Kisah Sodetan Ciliwung di Era Jokowi, Ahok, Anies, hingga Heru Budi," Tempo, diakses 20 Maret 2025, <https://www.tempo.co/arsip/kisah-sodetan-ciliwung-di-era-jokowi-ahok-anies-hingga-heru-budi-161186>.

⁴ Emir Yanwardhana. (2023, 31 Juli 2023 10:06). "Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Dikerjakan Hampir 11 Tahun". dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230731100138-4-458639/jokowi-sebut-sodetan-ciliwung-dikerjakan-hampir-11-tahun>

⁵ Pemerintah Kota Jakarta Timur. (2023, 10 Januari). Pemkot tegaskan dukung program nasional pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Diakses pada 21 November 2024, dari <https://timur.jakarta.go.id/berita/13859/pemkot-tegaskan-dukung-program-nasional-pembangunan-sodetan-kali-ciliwung>.

penggerak utama dalam pembiayaan dan pengerjaan teknis proyek, Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan regulasi dan standar teknis yang ditetapkan. Kementerian juga berfungsi dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung proyek ini.⁶

Sementara pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, bertanggung jawab atas aspek lokal seperti pembebasan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan penanganan dampak sosial, serta koordinasi lapangan. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas di lapangan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang akan terdampak oleh proyek. Mereka juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Keuntungan juga akan bisa dialami oleh Pemerintah daerah yakni, dalam bentuk peningkatan kualitas hidup warga yang tinggal di sekitar sungai. Dengan berkurangnya banjir, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan lebih baik, yang berdampak positif pada kegiatan ekonomi, dan beserta menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan pusat, memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan infrastruktur dan mitigasi bencana.⁷

Selain itu dalam kolaborasi ini, semua stakeholder terkait akan mendapat keuntungan. Pertama dari Pemerintah pusat dapat menunjukkan komitmen dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta, yang merupakan isu nasional. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat dukungan publik terhadap

⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Proyek Strategis Nasional: Penanganan Banjir Jakarta.

⁷ Kompas. (2023). Sodetan Ciliwung: Sejarah, Manfaat, dan Tantangan di Lapangan. Diakses dari www.kompas.com.

kebijakan infrastruktur yang diambil. Dan proyek ini memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya air dan mengurangi biaya tanggap darurat yang seringkali diperlukan akibat banjir. Lalu dari Pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI Jakarta, mendapatkan keuntungan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup warga yang tinggal di sekitar sungai. Dan proyek ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan pusat, memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan infrastruktur dan mitigasi bencana. Masyarakat sipil dan pihak swasta juga memiliki keuntungan sendiri yakni adanya peningkatan peluang bisnis serta pengurangan risiko banjir, dengan berkurangnya frekuensi dan durasi genangan air, masyarakat pun dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman.⁸

Namun, pelaksanaan proyek Sodedan Ciliwung ini tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama terkait masalah birokrasi, perbedaan prioritas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika politik yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan. Misalnya, proses pembebasan lahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta sering kali tertunda karena berbagai alasan, mulai dari perlawanan warga yang terdampak hingga minimnya sosialisasi mengenai manfaat proyek ini bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi tantangan besar yang memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek dapat berjalan sesuai dengan target.

Tantangan lainnya adalah terkadang adanya perbedaan kepentingan juga kurangnya kepercayaan dan bahkan kurang atau terbatasnya pengetahuan juga

⁸ Tempo. (2023). Proyek Sodedan Ciliwung: Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Banjir Jakarta. Diakses dari www.tempo.co.

pengalaman yang sering kali terjadi antara berbagai instansi terkait, baik di level pusat maupun daerah.⁹ Pembangunan infrastruktur besar seperti sodetan tidak hanya melibatkan satu atau dua institusi, melainkan banyak pihak, mulai dari Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, beserta Dinas-Dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup.

Meski demikian, praktik kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi ini, seperti perbedaan kepentingan politik, alokasi sumber daya, serta keterbatasan koordinasi antar instansi. Selain itu, proyek Sodetan Ciliwung ini juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat. Terdapat pihak yang mengkritik dampak yang didapat dari proyek ini, terutama terkait penataan ruang yang dinilai kurang memperhatikan aspek ekologis, karena memang proyek ini memerlukan pembebasan lahan yang cukup luas, termasuk penggusuran bangunan ilegal di sekitar lokasi proyek. Dan hal tersebut memengaruhi ekosistem lokal dan mengubah struktur ruang di daerah terkait.¹⁰¹¹ Hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan proyek, yang membutuhkan pendekatan kolaboratif tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat sipil.

⁹ Muhammad Noor, Falih Suaedi, dan Antun Mardiyanta, "Strengths and Interests Between Actors in Collaborative Governance: Review of the Riverside Settlement Revitalization Policy in Banjarmasin City," JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 27, no. 2 (November 2023): 93–106, ISSN 0852-9213 (Print), ISSN 2477-4693 (Online).

¹⁰ DetikNews. (2023, Januari 24). Apa yang terjadi pada proyek sodetan Ciliwung selama 6 tahun mangkrak. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6531698/apa-yang-terjadi-pada-proyek-sodetan-ciliwung-selama-6-tahun-mangkrak>

¹¹ DetikNews. (2016, September 29). Ini dampaknya jika sodetan Ciliwung tak kunjung rampung. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3202778/ini-dampaknya-jika-sodetan-ciliwung-tak-kunjung-rampung>

Proyek Sodedan Ciliwung lanjutan, sehingga total Panjang Sodedan Ciliwung 1,26 kilometer, akhirnya selesai. Pada 31 Juli 2023 diresmikan oleh Presiden Jokowi. Melihat kompleksitas masalah ini, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek Sodedan Ciliwung ini berjalan. Penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai hal yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat serta bagaimana model *Collaborative Governance* dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam sebuah proyek infrastruktur besar seperti Program Sodedan Ciliwung ini.

1.2 Perumusan Masalah

“Bagaimanakah kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Proyek Strategis Sodedan Ciliwung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek Sodedan Sungai Ciliwung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Secara akademis, harapannya penelitian mampu memberikan informasi di bidang ilmu politik-pemerintahan mengenai Analisa kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana alam yang memang menjadi masalah suatu pemerintahan. Selain hal tersebut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan menambah wawasan pembaca dalam hal melakukan riset khalayak dan kajian di bidang politik-pemerintahan.

1.4.2 Praktis

Harapannya penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh rakyat serta pemerintah terkait hal penanggulangan bencana alam banjir, dan mampu meningkatkan kompetensi berpikir secara kritis yang harus dimiliki oleh seorang masyarakat maju.

1.4.3 Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa dipakai menjadi acuan yang dapat digunakan untuk penelitian setelahnya. Selain itu, adanya penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan bagi yang membacanya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

1. *Collaborative Governance*: Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya

Penelitian dilakukan oleh Denny Irawan dari Universitas Airlangga (2016). Penelitian ini membahas proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengendalikan pencemaran udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence*, dan *planning collaborative actions*, belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi, terutama

kriteria *distributive accountability* dan *access to resources* pada tahap *debating strategies for influence*. Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam forum kolaborasi dan ketersediaan sumber keuangan yang masih belum mencukupi. Penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan kolaboratif. Selain itu, diperlukan manajemen sumber daya kolaborasi dengan mekanisme yang tepat bagi perkembangan pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya.

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung di Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara (Studi Kasus Putusan Nomor: 179/PDT/2019/PT DKI)

Penelitian dilakukan oleh Estri Dwi Lydiana Putri dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila (2023). Penelitian ini membahas pembangunan infrastruktur sodetan di Sungai Ciliwung dan peran Pemerintah DKI Jakarta dalam proyek tersebut dan membahas mengenai proses pengadaan tanah yang diperlukan untuk proyek pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor 179/PDT/2019, yang memberikan gambaran tentang aspek hukum dan administratif dalam pengadaan tanah, termasuk tantangan dan solusi yang dihadapi selama proses tersebut. Fokusnya adalah pada dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ini.

3. Pengorganisasian Masyarakat Ciliwung dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Penelitian dilakukan oleh Desty Ayu Rahmadani, dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022). Penelitian ini mengkaji peran pemerintah kota dalam pengorganisasian masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, termasuk banjir. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat lokal dalam konteks pengendalian banjir di wilayah Ciliwung.

4. Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Penelitian dilakukan oleh Yogatama Al Rasyid Putra dari Universitas Diponegoro (2024). Penelitian ini membahas collaborative governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses kolaboratif yang dilakukan antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi ekonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam komunikasi, anggaran, dan transparansi yang menghambat efektivitas collaborative governance. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor guna mengoptimalkan pengelolaan BUMDes di Desa Jetis.

5. Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kampung Tematik (Studi Penelitian Kampung Kuliner Pujasera Energi di Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang)

Penelitian dilakukan oleh Annisa Zahra Zinta selaku mahasiswa Universitas Diponegoro (2024). Penelitian ini membahas mengenai Kampung Kuliner Pujasera Energi di Kelurahan Tambakharjo, Kota Semarang, yang dikembangkan sebagai kampung tematik untuk menanggulangi kemiskinan akibat alih fungsi lahan tambak menjadi pemukiman. Namun, sejak diresmikan pada tahun 2021 hingga 2022, kampung ini menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya jumlah pengunjung dan aksesibilitas yang terbatas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana keberjalanan dan tingkat keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Kampung Kuliner Pujasera Energi, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses kolaborasi tersebut.

6. *Collaborative Governance* sebagai Langkah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Ekowisata Bahari Di Pulau Pisang)

Penelitian dilakukan oleh Devi Meri Yanti dan Kushandajani dari Universitas Diponegoro (2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan desain baru dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya melalui pendekatan kolaborasi (*Collaborative Governance*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan kriteria keberhasilan kolaborasi, terdapat tiga kriteria yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata, yaitu *governance*, akses terhadap otoritas, dan berbagi informasi.

7. Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso

Penelitian dilakukan oleh Karmila Akib, Muhammad Yaser Fedayyen, dan Sapruni Sapruni, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta analisis yang dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

8. Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Noor, Falih Suaedi, dan Antun Mardiyanta dan diterbitkan oleh Bildung (2022). Interaksi antaraktor yang dicapai dalam studi ini adalah bagaimana sebuah kebijakan dan tata kelola bisa memuaskan sebanyak mungkin pihak. Sedangkan collaborative governance adalah suatu capaian untuk mencari cara yang terbaik dari sebuah kebijakan. Dinamika interaksi antaraktor menyebabkan peluang-peluang untuk saling mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor menjadi lebih mudah terjadi. Seperti halnya, kondisi awal dalam kolaborasi antaraktor dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para aktor memiliki kepentingan

dan visi yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perdebatan antaraktor sehingga menghambat jalannya proses kolaborasi.

9. Collaborative Governance

Buku ini ditulis oleh Erni Qomariyah selaku dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo dan diterbitkan Selaras Media Kreasindo (2023). Dan membahas *Collaborative Governance*, atau tata kelola kolaboratif yang merupakan pendekatan yang mengakui pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam mengelola masalah kompleks dan mencapai tujuan bersama. Dalam collaborative governance, pengambilan keputusan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, melainkan menjadi usaha bersama yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Keunggulan dari pendekatan ini termasuk peningkatan akuntabilitas, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, serta pemecahan masalah yang lebih inovatif dan efektif.

10. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik

Penelitian dilakukan oleh Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono dan Abd. Rachim selaku dosen dari program studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2020). Buku ini merupakan hasil proses panjang dari beberapa penelitian yang dilakukan, utamanya penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi kolaborasi antar stakeholders dalam penanganan banjir paparan Danau Tempe yang setiap tahun datang dua kali.

1.5.2 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)

Istilah *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008).¹² Teori kolaborasi adalah dasar dari konsep pemerintahan kolaboratif. Secara dasar, kolaborasi adalah mengelola jaringan sosial, yang berfungsi sebagai tempat para pemangku kepentingan berkomunikasi. Menurut Silayar (2021), model tata kelola kolaboratif memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa operasi mereka berjalan dengan baik dan sinergis.

Dalam konteks pemerintahan, kerangka kerja kerja sama memiliki arti yang lebih dari sekadar pemerintahan. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep kebijakan publik yang paling berkembang adalah kerja sama pemerintahan. *Collaborative* (kolaborasi) dan *network* (jaringan) berbeda secara prinsip. Menurut Ansell dan Gash (2007), jaringan digunakan untuk memberikan gambaran tentang kerjasama pemerintah dengan masyarakat, yang lingkungannya plural, informal, dan implicit. Kemudian Balogh *et al.* dalam Subarsono (2011) mendefinisikan *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan kebijakan

¹² Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press, 2020), hlm. [41].

publik yang melibatkan berbagai aktor secara konstruktif yang berasal dari berbagai level. Level aktor tersebut dapat berasal dari instansi pemerintahan, instansi publik, instansi swasta, maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan publik.

Ansell dan Gash (2007), menekankan ada 6 kriteria dalam proses *Collaborative Governance*. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik; kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor non pemerintah; ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus; dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007).¹³ Secara sederhana *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana adanya kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik (Nasrulhaq, 2020).¹⁴

Definisi lain mengenai *Collaborative Governance* adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara

¹³ Dr. Erni Qomariyah, *Collaborative Governance* (Jakarta: SELARAS MEDIA KREASINDO, 2023), hlm. [55].

¹⁴ Karmila Akib, Muhammad Yasser Fedayyen, dan Sapruni, "Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 2 (Agustus 2023): [186], e-ISSN: 2620-3499 | p-ISSN: 2442-949X.

langsung berhubungan dengan stakeholder non-negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik.¹⁵

Sederhananya teori mengenai *Collaborative Governance* di atas sangat relevan, karena proyek Sodedan Ciliwung melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, beserta aktor lain seperti masyarakat. Dengan menerapkan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kolaborasi ini terjadi, tantangan juga hambatan yang ada dalam implementasi dari Konsep *Collaborative Governance* sesuai faktor diatas, beserta efektivitasnya. Ada beberapa komponen kunci atau indikator dalam *Collaborative Governance* yang perlu dicermati dalam konteks proyek ini:

1. Keterlibatan Aktor Multi-Level: Proyek Sodedan Ciliwung melibatkan berbagai aktor, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan masyarakat setempat. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikoordinasikan dengan baik.
2. Pengambilan Keputusan Bersama: Keputusan mengenai proyek ini diambil secara kolaboratif, di mana semua pihak berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan rencana tindakan.

¹⁵ Yunita Elianda. *Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman Tahun 2018*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

3. Kolaborasi dalam Pembagian Tugas dan Sumber Daya: Dalam pelaksanaan proyek, dibutuhkan pembagian tugas yang jelas serta alokasi sumber daya yang tepat agar proyek dapat berjalan efektif dan efisien.
4. Transparansi dalam Penyebaran Informasi: Dalam suatu proyek, untuk mendukung indikator poin transparansi penting memahami bahwa tingkat transparansi informasi yang dibagikan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan, karena transparansi yang baik akan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, dan juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Pada konteks indikator ini dalam Collaborative Governance menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2015) mencakup proses sistematis untuk menilai efektivitas kerja sama lintas aktor, termasuk penilaian terhadap pencapaian tujuan proyek, efektivitas koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pemantauan penggunaan sumber daya, serta identifikasi hambatan yang dihadapi, yang kemudian ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan dan regulasi, peningkatan mekanisme koordinasi, penerapan rekomendasi perbaikan teknis, serta pemantauan berkelanjutan guna memastikan proyek berjalan optimal, responsif terhadap dinamika yang ada, serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini memberikan landasan bagi analisis kolaborasi dalam proyek infrastruktur yang besar seperti Sodeitan Ciliwung. Dengan memahami

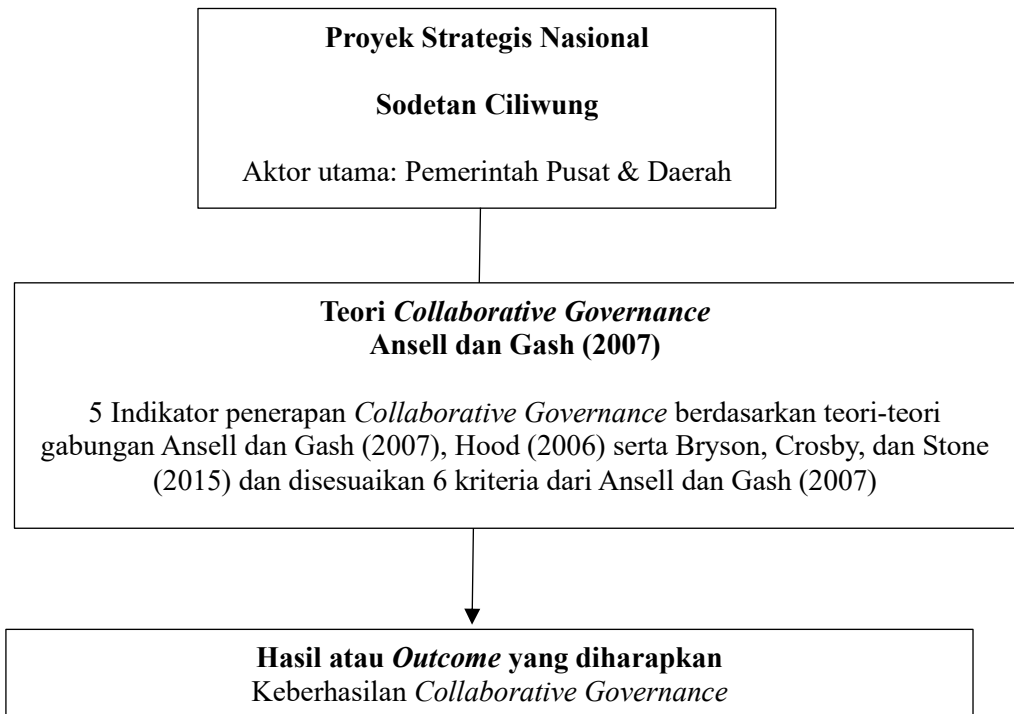
bagaimana model *Collaborative Governance* diterapkan, penelitian ini berupaya menjelaskan kolaborasi dalam mencapai tujuan proyek serta dampaknya terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* sebagai kerangka untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat yang terdampak dalam Proyek Sodedan Ciliwung. Dengan mengidentifikasi interaksi antara berbagai pihak. Teori *Collaborative Governance* akan digunakan untuk memahami bagaimana kolaborasi antar pihak dalam Proyek Sodedan Ciliwung dapat berjalan efektif.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance*, yang menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan.

Untuk memahami dinamika kolaborasi ini, penelitian akan mengidentifikasi para pemangku kepentingan utama dalam proyek Sodedan Ciliwung, peran dan tanggung jawab masing-masing, serta bentuk kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut adalah tabel kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Operasional

Collaborative Governance dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang melibatkan interaksi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan Proyek Sodetan Ciliwung. Konsep ini mengedepankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mitigasi banjir di Jakarta melalui proyek infrastruktur.

1.6.2 Indikator-indikator Collaborative Governance

Untuk mengukur efektivitas penerapan *Collaborative Governance*, indikator-indikator berikut yang dirangkum dari beberapa pendapat ahli akan digunakan:

1. Keterlibatan Stakeholder, Indikator: Aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Contohnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS Ciliwung Cisadane, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat sipil. Data ini akan diambil dari dokumentasi pertemuan dengan pihak instansi pemerintah beserta catatan resmi dari Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung.
2. Komunikasi dan Dialog, Indikator: Frekuensi dan kualitas komunikasi antar stakeholder. Contohnya seperti menghitung jumlah pertemuan yang diadakan selama proyek serta kualitas dialog yang tercermin dari notulen pertemuan dan umpan balik dari peserta.
3. Keputusan Bersama, Indikator: Prosentase keputusan yang diambil secara kolaboratif. Contohnya seperti menganalisis dokumen keputusan proyek untuk menilai seberapa banyak keputusan yang dihasilkan dari proses kolaborasi dibandingkan dengan keputusan sepihak.
4. Transparansi, Indikator: Tingkat transparansi informasi yang dibagikan kepada masyarakat. Contohnya seperti mengkaji jumlah publikasi dan informasi yang tersedia di situs resmi proyek, serta *feedback* dari masyarakat terkait akses informasi tersebut.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut, Indikator: Mekanisme evaluasi yang diterapkan untuk menilai efektivitas kolaborasi. Contohnya seperti dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut yang dihasilkan dari pertemuan evaluasi proyek.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang jelas dan terpercaya berupa observasi dan pernyataan tertulis yang dapat diperoleh langsung dari subjek manusia. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam format yang disusun dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan dapat didasarkan pada preseden hukum yang berlaku.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang terkait erat dengan Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat di mana proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek berlangsung, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Lokasi penelitian meliputi:

1. Inlet Sodetan Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur: Lokasi ini merupakan titik awal dari sodetan, di mana sebagian air Sungai Ciliwung dialihkan ke Kanal Banjir Timur. Observasi lapangan dilakukan di lokasi ini untuk melihat kondisi fisik infrastruktur dan dampak langsung dari proyek terhadap lingkungan sekitar.
2. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Bappeda merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan di tingkat provinsi. Penelitian di kantor Bappeda dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait

perencanaan dan evaluasi proyek Sodedan Ciliwung dari perspektif pemerintah daerah.

3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam memastikan bahwa proyek pembangunan, termasuk Sodedan Ciliwung, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Penelitian di kantor DLH dilakukan untuk memahami bagaimana proyek ini dinilai dan diawasi dari sudut pandang lingkungan.
4. Kantor Kelurahan Cawang: Kelurahan Cawang merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh proyek Sodedan Ciliwung. Penelitian di kantor kelurahan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat, serta bagaimana mengetahui peran dari kelurahan selaku posisi terdekat dengan masyarakat dan bisa mewakili suara masyarakat dalam *Collaborative Governance* pada pendirian Sodedan Ciliwung.

Pemilihan lokasi-lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Creswell (2007, 2013) menjelaskan pada penelitian kualitatif, data primer diperoleh dari sumber asli seperti hasil wawancara dengan informan terkait topik penelitian. Peneliti harus mengunjungi lokasi secara langsung untuk mengumpulkan data ini. Creswell juga menekankan pentingnya observasi langsung dalam pengumpulan data primer. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, literatur, dan buku-buku. Data ini telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan Pustaka seperti Dokumen Paparan Sodekan Ciliwung oleh Dinas Sumber Daya Air, Surat Keputusan Penetapan Lokasi Sodekan Ciliwung oleh Gubernur, dan Dokumen Komitmen Bersama oleh Kolaborasi antar Kementrian, Lembaga non-kementrian beserta dinas terkait, dan juga artikel dan berita online.

1.7.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁶

Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive*, yakni memilih informan dari pihak yang terlibat atau berpengalaman dan yang punya pengetahuan tentang proyek Sodedan Ciliwung. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1.2 Data Informan Penelitian

Pemerintah Pusat	Kementrian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Ferdinanto
		Operator Sodedan Ciliwung	Fadli dan Tama
Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	Cipta Aditya

¹⁶ Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Satuan Pelaksana UPSBA	Hariyanto Silalahi
	Dinas Sumber Daya Air	Bidang Perencanaan	Agis
	Kelurahan Ciliwung	Sekretaris	Kusaidi
		Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Edwin Rinaldo
Masyarakat	Warga Kelurahan Cipinang-Cempedak	Ruviera Alvaro Rusheesa	
	Warga Kelurahan Bidara Cina	Adinda Shafa	

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana untuk pengumpulan datanya peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan. Menurut Arikunto, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.¹⁷ Wawancara dilaksanakan pertama pada tanggal 22 Januari 2025 bersama Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, selanjutnya 13 Februari 2025 bersama Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA, selanjutnya

¹⁷ Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

pada 17 Februari 2025 secara tertulis dengan pihak BBWS Ciliwung-Cisadane melalui jawaban Kepala BBWSCC Ferdinanto, selanjutnya tanggal 21 Februari 2025 bersama Kusaidi, Sekretaris Kelurahan Cawang, selanjutnya 26 Februari 2025 bersama Fadli, Operator Sodetan Ciliwung, selanjutnya 8 Maret 2025 bersama Ruviera Alvaro Rusheesa, masyarakat Kelurahan Cipinang-Cempedak, selanjutnya 9 Maret 2025 bersama Adinda Shafa, masyarakat Kelurahan Bidara Cina, dan terakhir 11 Maret secara tertulis bersama Agis, Bidang Perencanaan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁸ Penelitian ini menggunakan data dari dokumen seperti Paparan Sodetan Ciliwung oleh Dinas Sumber Daya Air, Surat Keputusan Penetapan Lokasi Sodetan Ciliwung oleh Gubernur, dan Dokumen Komitmen Bersama oleh Kolaborasi antar Kementrian, Lembaga non-kementrian beserta dinas terkait, dan juga artikel dan berita online.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

¹⁸ Arief, R. D. (2023). Teknik Pengumpulan Data. Diakses dari <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data>

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap kapabilitas Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Analisis data dilakukan berdasar definisi dari Sugiyono melalui 3 hal, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dimana peneliti akan merangkum, kemudian memilih hal yang pokok dan penting juga memfokuskan pada aspek penting dan dicari polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data menggunakan metode kualitatif biasanya dengan teks yang bersifat naratif. Pada saat penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

3. Penarik Kesimpulan

Sebuah tahapan terakhir dari proses penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah Peneliti tulis dan pertanyakan.

¹⁹ Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2017).h.245

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjelaskan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.